

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah luput dari perhatian dan kebijakan terhadap usaha besar. Perhatian dan proteksi terhadap usaha-usaha besar, secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan adanya deskriminasi yang mana didalamnya disamping memberikan peluang pada usaha-usaha besar dalam mendapatkan lebih banyak dana, juga memperlihatkan upaya sistematis untuk terus memproteksi usaha-usaha besar dan memarginalkan ekonomi rakyat atau lebih khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.¹

Meskipun tidak memperoleh perhatian yang optimal, tetapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu memperlihatkan perkembangan usaha yang tangguh dan mandiri, bahkan menjadi pilar penyangga yang memperkuat struktur perekonomian Nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 57,9 juta unit

¹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009), hal. 35

usaha.² Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia.

Pada tahun 1997-1998 badai krisis moneter melanda Indonesia, usaha kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga ketika adanya fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Dengan menyadari betapa pentingnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tidak mengherankan bahwa pemerintahan di Indonesia sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.³

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan didukung dari lembaga yang tepat pula. Berkaitan dengan hal ini, paling tidak ada beberapa peran dan fungsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia.

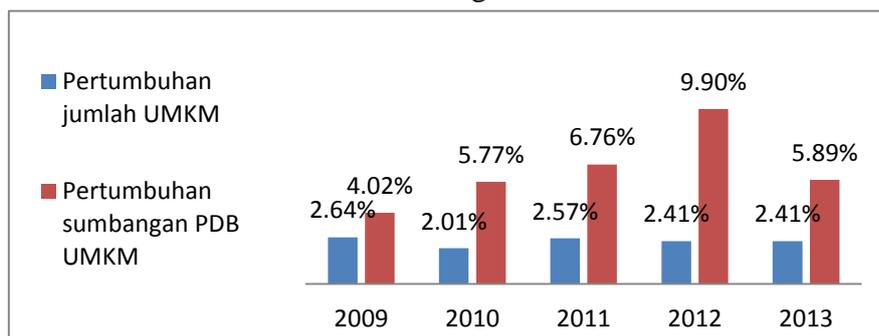
Pertama, Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja yang mampu melakukan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Kedua*, jumlah

² _____, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm)*, (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Bank Indonesia. Tahun 2015). Hal 6.

³ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia "Isu-Isu Penting"*. (Jakarta: LP3ES. 2012), hal. 1-5

Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat terserap kedalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan. *Ketiga*, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi terhadap pembentuk produk domestik bruto (PDB). *Keempat*, Sektor sebagai sumber penghasil devisa negara melalui ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan sektor ini. Berikut tabel data pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah periode tahun 2009-2013.

Diagram 1.1
 Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 dan sumbangan PDB



Sumber: badan pusat statistik

Diagram 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil, menengah pada tahun 2009 yaitu sebesar 52.764603 unit artinya masyarakat Indonesia masih memanfaatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhannya dalam keberlangsungan hidupnya, namun pada tahun 2012 pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengalami penurunan sebesar 0,16% dari tahun 2011 dengan jumlah 55.206.444 unit.

Penurunan ini menggambarkan adanya perpindahan pekerjaan, karena tidak mempunyai daya saing produk dan keterbatasan modal. Sesuai dengan *prosentase* jumlah pertumbuhan tersebut selayaknya, pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, karena di rasa kemajuannya kalah di bandingkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh industri besar di Indonesia.

Dari peran dan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang potensial dalam perekonomian di Indonesia, pengalam tersebut telah menyadarkan banyak pihak untuk memberikan porsi lebih besar terhadap bisnis skala mikro, kecil dan menengah. Pemerintah dan legislatif membuktikan perhatiannya terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan meluncurkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁴ Dengan adanya payung hukum tersebut, gerak Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi semakin leluasa. Persoalan klasik seperti akses permodalan kepada lembaga keuangan pun mulai teratasi. Karena dalam peraturan ini tercantum mengenai perluasan pendanaan dan fasilitasi oleh perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

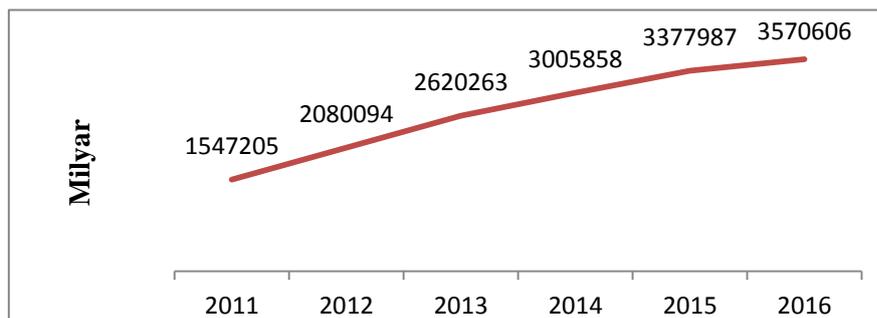
Dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian nasional, maka diperlukan lembaga perbankan yang mampu memberikan layanan secara luas kepada masyarakat. Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimaksudkan untuk memberikan layanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada masyarakat khususnya pengusaha Menengah,

⁴ *Undang-Undang Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (UU RI No. Tahun 2008). (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), hal. 1

Kecil dan Mikro baik di pedesaan maupun perkotaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai salah satu lembaga kepercayaan masyarakat yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dituntut agar selalu dapat mengemban amanah dari para pemilik dana dengan cara menyalurkan untuk usaha produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁵

Bank Indonesia menyediakan fasilitas likuiditas bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk pembiayaan modal kerja (PMK-BPRS) dan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan mikro (PPKM). Kontribusi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga turut andil dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Terbukti, lambat laun penyaluran pembiayaan di Bank pembiayaan rakyat syariah mengalami pertumbuhan. Berikut grafik pertumbuhan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Grafik 1.1
Pertumbuhan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah



Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dari grafik 1.1 menunjukkan bahwa setiap tahun pertumbuhan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin meningkat.

⁵ Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 / Pojk.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ditunjukkan dari tahun 2011 mencapai Rp.1547205 (Milyar) menuju tahun 2016 mencapai pertumbuhan sebesar Rp. 3570606 (Milyar). Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah semakin baik setiap tahunnya. Namun demikian, perbaikan harus terus menerus menjadi perhatian dari sisi kuantitas maupun kualitasnya agar penyaluran pembiayaan tepat sasaran dan menghasilkan pembiayaan yang berkualitas baik dan lancar.

Dari jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagian besar memiliki modal inti yang terbatas. Dengan terbatasnya modal inti dibawah 6 Milyar kinerja perbankan cenderung buruk tercerin dari NPF tinggi, BOPO tinggi dan ROA rendah. Hal ini menunjukkan Bank Syariah kurang memainkan peranan yang signifikan didalam pembiayaan bisnis skala kecil dan menengah, sebgai ciri utama yang harus dikedepankan guna mengedepankan kesejahteraan rakyat.⁶

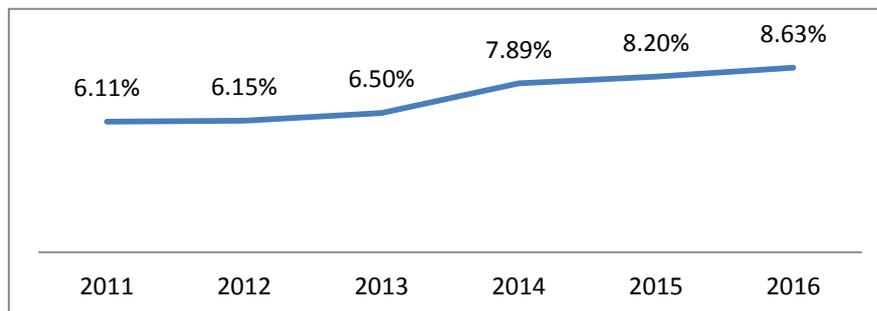
Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, perbankan syariah yang di dalamnya pula termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsaanya, salah satunya dari segi pembiayaan dan juga memberikan dukungan besar terhadap sektor riil.⁷

⁶ Umar Caphra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), hal. 232

⁷ Wuri Anianti dan Harjun Muharam, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Dan Return On Asset (ROA), terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah", [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/3245/1/Jurnalwuri.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/3245/1/Jurnalwuri.Pdf), di akses pada 02 Desember 2016.

Berdasarkan sifat penggunaan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah salah satunya adalah dalam bentuk pembiayaan modal kerja (PMK-BPRS) dan pembiayaan bagi pengusaha kecil dan mikro (PPKM). Dengan begitu jika semakin tingginya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kepada masyarakat maka akan berdampak pula terhadap risiko pembiayaan bermasalah sehingga mengakibatkan *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Berikut tingkat pertumbuhan *Non performing financing* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia periode tahun 2013 sampai 2015.

Grafik 1.2
Pertumbuhan *Non Performing Financing*



Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Dari grafik 1.2 menunjukkan rasio pembiayaan bermasalah per juli 2016 sudah jauh diatas batas aman yang telah ditetapkan yaitu mencapai 9,97%. Kondisi ekonomi yang kurang baik mempengaruhi kemampuan pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengembalikan pinjamannya. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank.

Non Performing Financing (NPF) ini menunjukkan seberapa besar kolatibilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengumpulkan

kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Tingginya *Non Performing Financing* (NPF) dapat mempengaruhi kebijakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan pembiayaannya yaitu bank menjadi lebih berhati-hati. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adzimatnur “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa variabel NPF, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah.⁸

Seperti disebut di atas bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan, diketahui bahwa bank merupakan lembaga keuangan (*financial institution*) yang berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang kelebihan dan (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*deficit unit*). Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan pengendapan yang memadai.⁹

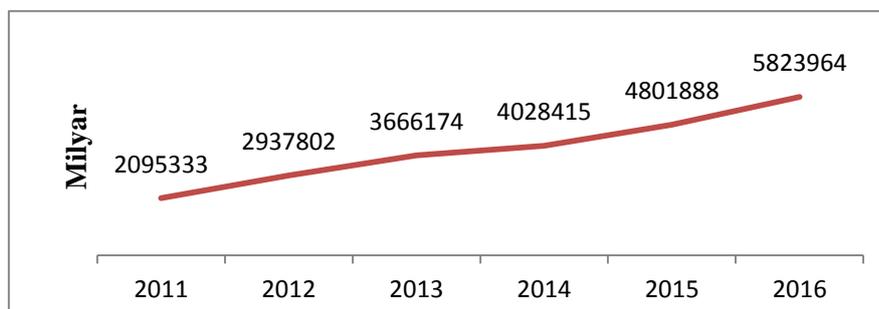
Salah satu bentuk dana yang diterima adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang bersumber dari masyarakat dan berasal dari simpanan giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Setelah dana dikumpulkan oleh bank, maka sesuai

⁸ Fauziah Adzimatnur, Sri Hartoyo dan Ranti Wiliasih, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia”, Dalam Jurnal Al-Muzara’ah (ISSN P: 2337-6333; E: 2355-4363)

⁹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonosia. 2005), hal. 49

dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2013 sampai 2015 penghimpunan dana pihak ketiga di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat pada grafik 1.3

Grafik 1.3
Pertumbuhan Jumlah Dana Pihak Ketiga



Sumber: statistik perbankan syariah

Menurut Kasmir, kebutuhan dana ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja dan dapat dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan (lembaga keuangan).¹⁰ Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha dan investasi akan sulit berembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Citra “pengaruh NPF, DPK dan Inflasi terhadap penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil

¹⁰ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). hal. 29

dan Menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia”.¹¹ Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UKM.

Variabel makro yakni tingkat inflasi dan tingkat suku bunga merupakan komponen yang perlu diperhatikan. Menurut Sukirno yang disebut inflasi yaitu, kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode lainnya.¹² Peristiwa inflasi ini mengakibatkan sebuah ketidakpastian bagi masyarakat, oleh karena itu banyak dari mereka mengambil tindakan dengan cara mengubah asset yang dimilikinya menjadi aset riil atau aset yang nilainya cenderung tidak mengalami penurunan tajam seperti emas, tanah, dan sebagainya. Masyarakat lebih condong membelanjakan uangnya pada hal non-produktif sehingga mengakibatkan turunnya permintaan masyarakat untuk mendepositokan dananya pada bank, yang berarti juga akan mempengaruhi penyaluran dana pembiayaan oleh bank umum syariah kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Tingginya inflasi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam pengerahan dana masyarakat.

Berdasarkan data Bank Indonesia laju Inflasi mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat pada grafik 1.3 berikut.

¹¹ Cahya Masturina Citra, "Pengaruh NPF, DPK dan Inflasi terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) pada BPRS di Indonesia", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

¹² Sudono Sukirno, *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004). hal.27

Grafik 1.4
Laju Inflasi

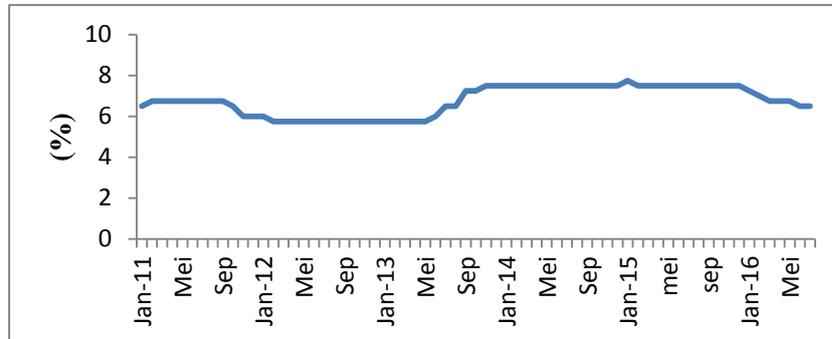


Sumber : Bank Indonesia

Apabila inflasi menyebabkan naiknya biaya produksi hingga pada akhirnya akan merugikan produsen, maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu, bahkan tidak sanggup mengikuti laju inflasi, dan sampai mengakibatkan gulung tikar, biasanya terjadi pada pengusaha kecil. sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dahlan yang menyebutkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan Bank Syariah. Inflasi termasuk variabel yang mempengaruhi posisi kredit UMKM dari sisi permintaan. Inflasi yang tinggi akan membuat permintaan pembiayaan menurun. Selain karena inflasi yang tinggi berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga permintaan kredit konsumsi akan menurun pula.¹³

¹³ Rahmad Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus SBIS dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia", Dalam Jurnal EQUILIBRUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

Grafik 1.5
Laju Tingkat Suku Bunga



Sumber : Bank Indonesia

Tingkat suku bunga pada dasarnya setiap kenaikan tingkat suku bunga menyebabkan permintaan turun begitu pula sebaliknya saat suku bunga turun maka permintaan pinjaman naik. Bagi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM, suku bunga menentukan dalam pengelolaan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Semakin tinggi tingkat suku bunga pinjaman bank semakin tinggi tingkat pengembalian pinjaman tersebut. Jika semakin tinggi juga tingkat suku bunga akan mengakibatkan kenaikan oleh bunga bank-bank umum, sehingga menyebabkan dunia mengalami kelesuan, karena permintaan agregat akan turun. Berdasarkan data Bank Indonesia Tingkat Suku Bunga mengalami fluktuasi, hal ini dapat dilihat pada grafik 1.5 diatas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daud.¹⁴ Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, variabel independen Inflasi, BI Rate, tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan UKM pada perbankan syariah di Indonesia.

¹⁴ Annisa Hidayati Arief Daud, "Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbankan syariah dan juga di dalamnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Di samping itu, kehadiran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diharapkan mampu berperan aktif dalam pengembangan usaha di sektor riil khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut :

1. *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang cenderung mengalami fluktuasi selama periode Januari 2011 sampai dengan Juli 2016 mempengaruhi kolatibilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan.
2. Dana Pihak Ketiga yang terus mengalami peningkatan selama periode Januari 2011 sampai dengan Juli 2016 akan mendorong kemampuan

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

3. Tingkat Suku Bunga yang cenderung mengalami fluktuasi selama periode Januari 2011 sampai dengan Juli 2016 akan mengakibatkan permintaan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah akan menurun.
4. Inflasi yang cenderung mengalami fluktuasi selama periode Januari 2011 sampai dengan Juli 2016 akan mempengaruhi turunnya penyaluran pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

C. RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan permasalahan di atas maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah?
3. Apakah Tingkat Suku Bunga berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?
4. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?

5. Apakah *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai peneliti adalah :

1. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Untuk menguji pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
4. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat.
5. Untuk menguji pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga secara bersama-sama terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran khususnya di bidang keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta sebagai bahan referensi dan data bagi peneliti-peneliti yang tertarik di bidang kajian ini.

2. Manfaat bagi dunia praktik

a. Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Manfaat bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta strategi untuk meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b. Bagi pemerintah

Manfaat bagi pemerintah adalah sebagai informasi bagaimana pemerintah dapat meningkatkan daya saing sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan melalui kebijakan-kebijakan yang mencakup peningkatan kapasitas dan kinerja usaha, penguatan dan pendukung usaha serta peningkatan dukungan iklim usaha.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan Bank Pembiayaan rakyat syariah khususnya di bidang pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

F. RUANG LINGKUP DAN KETEBATASAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian hanya akan membahas pengalokasian dana dari bank pembiayaan rakyat syari'ah yang dipublikasikan pada statistik perbankan syariah untuk perkembangan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia. Sedangkan yang menjadi variabel pada penelitian ini yaitu:

- a. Peneliti hanya meneliti empat variabel yang mempengaruhi pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yaitu, *Non Performing financing*, Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi.
- b. Ruang lingkup data yang akan diteliti adalah data sekunder yang di publikasikan di Statistik Perbankan Syariah dan Bank Indonesia.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka keterbatasan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini hanya menganalisis faktor yang mempengaruhi pembiayaan dari sisi internal dan variabel makro ekonomi.

- b. Data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada laporan keuangan yang di publikasikan oleh Statistik Perbankan Syariah dan Bank Indonesia.
- c. Cakupan variabel pembiayaan terlalu luas meliputi semua pembiayaan yang ada dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

G. PENEGASAN ISTILAH

Untuk menghindari kesalahpahaman, memudahkan menelaah, dan memahami pokok-pokok permasalahan dalam uraian selanjutnya, maka terlebih dahulu penulis kemukakan pengertian yang ada dalam judul skripsi di atas. Adapun istilah-istilah yang akan penulis kemukakan dalam judul adalah sebagai berikut.

1. Secara Konseptual

a. NPF (*Non Performing Financing*)

Non Performing Financing merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁵

b. Dana Pihak Ketiga

Merupakan sumber dana bank yang diperoleh dari masyarakat yang berbentuk giro, tabungan, dan deposito.¹⁶

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Kanisius. 2004), hal. 285

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2002), hal. 33

c. Tingkat suku bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).¹⁷

d. Inflasi

Para ekonom mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit penghitung moneter) terhadap barang atau komoditas dan jasa.¹⁸

e. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pembiayaan adalah proses pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁹

2. Secara operasional

a. *Non Performing Financing*

“Non Performing Loan/Non Performing Financing (NPL/NPF) Kredit atau Pembiayaan UMKM adalah penjumlahan Kredit atau Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria UMKM. Perhitungan rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan

¹⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga...*, hal. 123

¹⁸ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008), hal. 135

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005), hal. 17

UMKM dilakukan dengan membandingkan NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan UMKM Bank Umum”. Yang dimaksud dengan NPL/NPF adalah NPL/NPF yang dihitung secara gross. Rasio NPL/NPF Kredit atau Pembiayaan UMKM dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{NPL/NPF Kredit atau atau pembiayaan UMKM}}{\text{Total Kredit atau pembiayaan UMKM}} \times 100\%$$

b. Dana pihak ketiga

Dana Pihak Ketiga yang bersumber dari masyarakat dan berasal dari simpanan giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha dan investasi akan sulit berembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat.

c. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga atau *BI rate* adalah suku bunga kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Tingkat suku bunga bank Indonesia adalah suku bunga dengan tenor 1 bulan yang di umumkan oleh Bank Indonesia secara periodik dan dengan jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal

kebijakan moneter guna menjamin terciptanya kestabilan nilai Rupiah.²⁰

d. Inflasi

Inlasi dihitung berdasarkan indeks harga konsumen, sehingga diketahui laju kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Inf = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

f. Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam kegiatannya menyalurkan dana kepada masyarakat Bank pembiayaan Rakyat Syariah dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, jual beli, sewa-menyewa, dan pengalihan hutang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab yang di setiap babnya terdapat sub-bab. Sebagai perincian dari kelima bab tersebut, maka sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bagian awal, terdiri

dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

²⁰ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indah. 2004), hal. 23

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini yang di dalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan berbagai teori, konsep dan anggapan dasar tentang teori dari variabel-variabel penelitian yang terdiri dari: (a) *Non Performing Financing* (NPF), (b) Dana pihak ketiga (DPK) (c) Inflasi, (d) Tingkat Suku Bunga (e) kajian penelitian terdahulu, (f) kerangka konseptual, dan (g) hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat rancangan penelitian, yakni terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta (e) teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini memuat deskripsi singkat hasil penelitian, terdiri dari: (a) hasil penelitian (berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) dan (b) temuan penelitian.

BAB V HASIL PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan memuat tentang bagian akhir yakni : (a) kesimpulan dan (b) saran.

Bagian akhir, terdiri dari : (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian Skripsi, (d) daftar riwayat hidup.